GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 10 Oktober 2026

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM TATA KELOLA KELESTARIAN ADAT SANDO BATU DI DESA TANA TORO KECAMATAN PITU RIASE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Herlina[1], Herman Dema[2], Barisan[3]
[1,2,3]Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenrang Rappang
Email Korespondensi: herlinaramly5@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Tana Toro Village Government in the governance of the preservation of the Sando Batu Custom and to identify the obstacles faced in its implementation. The background of this study is the importance of preserving the Sando Batu Custom as part of the identity and cultural heritage of the Tana Toro Village community amid social change and the passage of time. The study employs a qualitative descriptive approach, with the research site located in Tana Toro Village, Pitu Riase Subdistrict, Sidenreng Rappang Regency. Data were collected through observation, interviews, and documentation, involving seven informants comprising village officials, traditional leaders, and community members. Data validity was ensured through extended observation, increased diligence, and source triangulation, while data analysis employed the Miles and Huberman model through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing and verification. The research findings indicate that the Tana Toro Village Government has fulfilled its roles as a regulator, catalyst, and facilitator in the governance of the Sando Batu customary tradition. The role of catalyst is realized through capacity building and the involvement of the community and customary leaders, while the role of facilitator is carried out through support for accessibility to customary sites, supporting infrastructure, and the use of digital media. However, the role as a regulator has not been fully optimized because there is currently no Village Regulation specifically governing the preservation of the Sando Batu Customary Tradition. The governance of customary tradition preservation encompasses the protection of customary values and symbols, the empowerment of indigenous communities, and the development of traditions and innovations. Its implementation still faces challenges in the form of limited facilities and infrastructure, the lack of sustained capacity-building for the younger generation, and the suboptimal use of digital media. This study concludes that the village government plays a crucial role in ensuring the sustainability of the Sando Batu Custom, but this role needs to be strengthened through village regulations, the reinforcement of the transmission of traditional knowledge, the provision of supporting facilities, and the utilization of digital technology all while preserving traditional values and identity.
Keywords: Village government, Governance, Preservation of customary practices, Sando Batu Customs.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pemerintah Desa Tana Toro dalam tata kelola kelestarian Adat Sando Batu serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya pelestarian Adat Sando Batu sebagai bagian dari identitas dan warisan budaya masyarakat Desa Tana Toro di tengah perubahan sosial dan perkembangan zaman. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian di Desa Tana Toro, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan 7 informan yang terdiri atas pemerintah desa, tokoh adat, dan masyarakat. Keabsahan data dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, dan triangulasi sumber, sedangkan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 10 Oktober 2026

Pemerintah Desa Tana Toro telah menjalankan peran sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam tata kelola kelestarian Adat Sando Batu. Peran dinamisator diwujudkan melalui pembinaan dan pelibatan masyarakat serta tokoh adat, sedangkan peran fasilitator dilakukan melalui dukungan terhadap aksesibilitas lokasi adat, sarana pendukung, dan pemanfaatan media digital. Namun, peran regulator belum optimal karena belum terdapat Peraturan Desa yang secara khusus mengatur pelestarian Adat Sando Batu. Tata kelola kelestarian adat mencakup perlindungan nilai dan simbol adat, pemberdayaan masyarakat adat, serta pengembangan tradisi dan inovasi. Pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana dan prasarana, pembinaan generasi muda yang belum berkelanjutan, serta pemanfaatan media digital yang belum optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran pemerintah desa memiliki posisi penting dalam menjaga keberlanjutan Adat Sando Batu, tetapi perlu diperkuat melalui regulasi desa, penguatan regenerasi pengetahuan adat, penyediaan fasilitas pendukung, dan pemanfaatan teknologi digital dengan tetap mempertahankan nilai dan identitas adat.
Kata kunci: Pemerintah desa, Tata kelola, Kelestarian adat, Adat Sando Batu.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun (Pratiwi et al. 2018). Adat tidak hanya menjadi identitas suatu masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan sosial, spiritual, serta hubungan manusia dengan lingkungan (Widianto and Lutfiana 2021). Keberadaan adat menjadi bagian penting dalam mempertahankan identitas dan kohesi sosial masyarakat di tengah perubahan sosial yang semakin dinamis (Pratiwi et al. 2018). Oleh karena itu, pelestarian adat perlu ditempatkan sebagai bagian dari tata kelola kehidupan masyarakat agar nilai, norma, simbol, dan praktik budaya dapat terus diwariskan kepada generasi berikutnya (Adhi et al. 2021). Dalam konteks pemerintahan desa, upaya tersebut tidak terlepas dari kewenangan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional (Hariri 2019).

Pemerintah desa memiliki posisi strategis dalam pelestarian budaya lokal karena merupakan institusi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat (Windah et al. 2025). Pemerintah desa tidak hanya menjalankan fungsi administratif dan pembangunan, tetapi juga memiliki peran dalam menjaga nilai sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks pelestarian adat, pemerintah desa dapat menjalankan fungsi sebagai regulator melalui penyusunan kebijakan, sebagai dinamisator melalui pembinaan dan penggerakan partisipasi masyarakat, serta sebagai fasilitator melalui penyediaan dukungan dan sarana yang dibutuhkan. Pelaksanaan fungsi tersebut perlu dilakukan secara kolaboratif dengan tokoh adat dan masyarakat agar kebijakan pemerintah desa tetap sejalan dengan nilai dan norma yang hidup dalam komunitas. Dengan demikian, tata kelola pelestarian adat membutuhkan keterhubungan antara kewenangan pemerintah desa, kapasitas lembaga adat, dan partisipasi masyarakat (Yadi and Prihatin 2024).

Salah satu tradisi yang masih dipertahankan adalah Adat Sando Batu di Desa Tana Toro, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang. Adat Sando Batu merupakan tradisi yang dilaksanakan secara periodik, yaitu setiap tiga tahun sekali, dengan tata cara pelaksanaan yang ditentukan oleh tokoh adat setempat. Pelaksanaannya tidak hanya melibatkan masyarakat Desa Tana Toro, tetapi juga keturunan dari daerah lain yang memiliki hubungan silsilah dengan adat tersebut. Tradisi ini mengandung nilai spiritual, solidaritas, identitas budaya, serta kearifan lokal yang berkaitan dengan hubungan manusia, alam, dan leluhur (Widiyanto 2021). Keberadaan Adat Sando Batu dengan demikian tidak hanya penting sebagai praktik ritual, tetapi juga sebagai warisan budaya yang merepresentasikan identitas dan kehidupan sosial masyarakat setempat (Pratiwi et al. 2018).

Meskipun memiliki nilai penting bagi masyarakat, tata kelola kelestarian Adat Sando Batu masih menghadapi sejumlah persoalan. Data awal penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah desa dalam pelestarian adat belum optimal, yang terlihat dari terbatasnya dukungan program, belum kuatnya

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 10 Oktober 2026

pembinaan kepada generasi muda, serta belum optimalnya sinergi antara pemerintah desa dan tokoh adat. Pada saat yang sama, partisipasi generasi muda dalam kegiatan adat masih relatif terbatas sehingga dapat memengaruhi keberlanjutan proses pewarisan nilai dan praktik budaya. Kondisi tersebut menjadi semakin penting untuk diperhatikan karena perubahan sosial dan modernisasi dapat memengaruhi keberlangsungan tradisi apabila tidak diikuti dengan strategi pelestarian yang terarah. Oleh sebab itu, pemerintah desa perlu menjalankan perannya tidak hanya sebagai penyelenggara administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai pengayom, penggerak, dan fasilitator dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya masyarakat.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan pentingnya keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan lembaga adat dalam menjaga keberlanjutan budaya lokal (Todapa and Juemi 2022). Penelitian Sari (2021) menunjukkan bahwa peran pemerintah desa memiliki hubungan dengan kelestarian adat yang didukung oleh partisipasi masyarakat adat dan regulasi desa adat. Putra (2020) menemukan bahwa kepemimpinan desa dan partisipasi masyarakat berkontribusi terhadap keberlanjutan adat melalui penguatan norma lokal dan kegiatan adat. Sementara itu, Nasir (2022) menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah desa, lembaga adat, dan pemuda memberikan kontribusi positif terhadap pelestarian tradisi lokal. Meskipun demikian, penelitian terdahulu tersebut cenderung menggunakan pendekatan kuantitatif dan menempatkan peran pemerintah, kepemimpinan, lembaga adat, serta partisipasi masyarakat sebagai variabel yang dianalisis secara terpisah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menempatkan tata kelola kelestarian Adat Sando Batu sebagai fokus kajian dengan menelaah peran pemerintah desa secara lebih mendalam melalui pendekatan kualitatif. Analisis peran pemerintah desa menggunakan tiga dimensi, yaitu regulator, dinamisator, dan fasilitator, sedangkan tata kelola kelestarian adat dilihat melalui aspek perlindungan nilai dan simbol adat, pemberdayaan masyarakat adat, serta pengembangan tradisi dan inovasi adat. Kerangka tersebut digunakan untuk memahami bagaimana pemerintah desa menjalankan perannya dalam menjaga keberlanjutan Adat Sando Batu sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Desa Tana Toro dalam tata kelola kelestarian Adat Sando Batu serta mengidentifikasi kendala yang memengaruhi pelaksanaan peran tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam tata kelola kelestarian Adat Sando Batu di Desa Tana Toro, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai praktik, pengalaman, dan pandangan para pihak yang terlibat dalam pelestarian adat (Cresell 2007). Fokus penelitian meliputi peran pemerintah desa dalam pelestarian Adat Sando Batu serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peran tersebut**.** Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung untuk mengamati kondisi dan aktivitas yang berkaitan dengan tata kelola kelestarian Adat Sando Batu. Wawancara dilakukan secara terstruktur kepada 7 informan yang terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, tokoh adat, dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan adat. Wawancara diarahkan untuk memperoleh informasi mengenai peran pemerintah desa sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator, termasuk berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara melalui dokumen serta foto yang relevan dengan penelitian (Merriam and Tissdell 2015).

Keabsahan data dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, dan triangulasi sumber (Creswell and Poth 2018). Perpanjangan pengamatan dilakukan dengan kembali ke lokasi penelitian untuk memastikan kelengkapan dan ketepatan data. Peningkatan ketekunan dilakukan melalui pemeriksaan data secara sistematis serta pencermatan terhadap referensi dan dokumen yang relevan. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pemerintah desa, tokoh adat, dan masyarakat, kemudian menghubungkannya dengan hasil observasi dan dokumentasi. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan kredibilitas dan konsistensi data penelitian (Merriam and

Tisdell 2016). Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles et al. 2020). Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, memusatkan, dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian naratif dan tabel untuk memudahkan identifikasi pola serta keterkaitan antartemuan. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan dan verifikasi kesimpulan secara berkelanjutan dengan membandingkan temuan antarsumber hingga diperoleh interpretasi yang sesuai dengan data empiris penelitian.

PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Desa dalam Tata Kelola Kelestarian Adat Sando Batu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tana Toro telah menjalankan peran dalam tata kelola kelestarian Adat Sando Batu melalui fungsi sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Ketiga fungsi tersebut menunjukkan bahwa pelestarian adat tidak hanya menjadi tanggung jawab tokoh adat dan masyarakat, tetapi juga membutuhkan dukungan kelembagaan pemerintah desa. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa telah memberikan dukungan terhadap kegiatan adat, mendorong keterlibatan masyarakat, serta memfasilitasi kebutuhan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan adat. Namun, pelaksanaan peran tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala berupa belum adanya regulasi khusus, keterbatasan sarana dan prasarana, pembinaan generasi muda yang belum berkelanjutan, serta pemanfaatan media digital yang belum maksimal.

Peran Pemerintah Desa sebagai Regulator

Peran pemerintah desa sebagai regulator berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam menyediakan kebijakan dan aturan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelestarian adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampai penelitian dilakukan belum terdapat Peraturan Desa (Perdes) yang secara khusus mengatur pelestarian Adat Sando Batu. Pelaksanaan adat masih berlandaskan kebiasaan, kesepakatan masyarakat, serta ketentuan yang dijaga oleh tokoh adat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi regulator pemerintah desa belum berjalan secara optimal karena dukungan terhadap pelestarian adat belum diperkuat melalui instrumen kebijakan yang bersifat formal.

Temuan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara dukungan pemerintah desa secara praktis dan penguatan pelestarian secara kelembagaan. Pemerintah desa telah menunjukkan komitmen untuk mendukung keberadaan Adat Sando Batu dan menyadari pentingnya regulasi, tetapi komitmen tersebut belum diwujudkan dalam bentuk Perdes. Padahal, regulasi desa dapat memberikan kepastian mengenai bentuk perlindungan, pembagian peran, mekanisme pelaksanaan, serta dukungan pemerintah desa terhadap keberlanjutan adat. Dengan demikian, regulasi tidak dimaksudkan untuk menggantikan kewenangan tokoh adat, tetapi menjadi instrumen kelembagaan untuk memperkuat perlindungan terhadap adat yang telah hidup dan berkembang di masyarakat.

Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa keberlanjutan Adat Sando Batu masih sangat bergantung pada kebiasaan dan komitmen para aktor yang terlibat. Pola tersebut selama ini mampu mempertahankan pelaksanaan adat, tetapi belum memberikan jaminan kelembagaan yang kuat untuk menghadapi perubahan sosial dan pergantian kepemimpinan. Oleh karena itu, penyusunan Perdes tentang pelestarian Adat Sando Batu menjadi kebutuhan penting. Proses penyusunannya perlu dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemerintah desa, tokoh adat, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat agar regulasi yang dihasilkan dapat memberikan perlindungan tanpa menghilangkan nilai serta kewenangan adat.

Secara teoritis penelitian Ansell dan Gash (2008) mengembangkan teori *collaborative governance* sebagai suatu pengaturan pemerintahan yang melibatkan satu atau lebih lembaga publik secara langsung dengan aktor non-negara dalam suatu proses pengambilan keputusan yang bersifat kolektif, formal, berorientasi konsensus, dan deliberatif, yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik maupun mengelola program dan aset publik. Menurut kedua ahli tersebut, keberhasilan kolaborasi ditentukan oleh sejumlah variabel kunci, di antaranya kondisi awal hubungan antaraktor (*starting*

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 10 Oktober 2026

conditions), kepemimpinan yang fasilitatif (*facilitative leadership*), desain kelembagaan yang jelas (*institutional design*), serta proses kolaboratif itu sendiri yang mencakup dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan pencapaian hasil-hasil antara yang bernilai kecil (*small wins*). Dengan demikian, sinergi antara pemerintah desa dan tokoh adat dalam kerangka *collaborative governance* menjadi prasyarat penting agar pelestarian Adat Sando Batu dapat berjalan secara efektif, terlembaga, dan tidak bergantung pada inisiatif individu maupun kelompok adat semata (Ansell and Gash 2008).

Peran Pemerintah Desa sebagai Dinamisator

Sebagai dinamisator, pemerintah desa berperan dalam menggerakkan masyarakat dan mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam pelestarian Adat Sando Batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran tersebut telah dilakukan melalui pembinaan, pelatihan, penyampaian informasi, pelibatan tokoh adat, serta keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan adat. Pemerintah desa juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan keberlangsungan Adat Sando Batu.

Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa pelestarian adat telah memiliki basis partisipasi masyarakat. Pemerintah desa berfungsi sebagai penggerak, sedangkan tokoh adat berperan dalam menjaga pengetahuan, nilai, dan tata cara adat. Masyarakat menjadi aktor yang mempertahankan keberadaan tradisi melalui keterlibatan langsung dalam pelaksanaannya. Pola tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan adat membutuhkan hubungan yang saling mendukung antara pemerintah desa, tokoh adat, dan masyarakat.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan, khususnya kepada generasi muda, belum dilakukan secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menjadi tantangan karena keberadaan tokoh adat sebagai pemegang pengetahuan budaya perlu diikuti dengan proses pewarisan kepada generasi penerus. Kegiatan pembinaan tidak cukup dilakukan hanya pada saat pelaksanaan adat, tetapi perlu dikembangkan secara rutin melalui sosialisasi, pelatihan, dan pelibatan generasi muda dalam kegiatan budaya. Dengan demikian, peran dinamisator pemerintah desa perlu diarahkan tidak hanya untuk menggerakkan partisipasi masyarakat, tetapi juga memperkuat proses regenerasi pengetahuan dan nilai Adat Sando Batu.

Peran Pemerintah Desa sebagai Fasilitator

Peran pemerintah desa sebagai fasilitator diwujudkan melalui dukungan terhadap akses jalan, sarana dan prasarana, serta pemanfaatan media digital untuk memperkenalkan Adat Sando Batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses menuju lokasi adat telah mengalami perbaikan melalui kerja sama antara masyarakat dan pemerintah desa. Perbaikan tersebut menunjukkan adanya bentuk fasilitasi yang didukung oleh partisipasi dan gotong royong masyarakat. Namun, masih terdapat bagian akses yang memerlukan peningkatan sehingga dukungan terhadap infrastruktur belum sepenuhnya optimal.

Pada aspek sarana dan prasarana, kebutuhan berupa rumah atau tempat beristirahat di lokasi adat belum terealisasi. Pemerintah desa telah mengupayakan penyediaannya, sementara masyarakat menunjukkan dukungan melalui persiapan lokasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan fungsi fasilitator pada tahap dukungan dan perencanaan, tetapi belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan fasilitas pendukung. Oleh karena itu, kebutuhan sarana dan prasarana adat perlu diintegrasikan secara lebih terarah dalam perencanaan pembangunan desa agar dukungan terhadap pelestarian adat tidak berhenti pada komitmen, tetapi dapat diwujudkan dalam bentuk fasilitas yang dibutuhkan masyarakat.

Selain fasilitasi fisik, pemerintah desa juga melihat media sosial sebagai sarana untuk memperkenalkan Adat Sando Batu secara lebih luas. Pemanfaatan media digital memiliki potensi untuk menjangkau generasi muda dan masyarakat di luar Desa Tana Toro serta membantu mendokumentasikan kegiatan budaya. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatannya belum optimal. Media digital sebaiknya tidak hanya digunakan untuk promosi, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 10 Oktober 2026

dokumentasi nilai, sejarah, simbol, serta praktik Adat Sando Batu. Dalam pelaksanaannya, keterlibatan tokoh adat diperlukan agar informasi yang disampaikan tetap sesuai dengan nilai dan ketentuan adat.

Tata Kelola Kelestarian Adat Sando Batu

Tata kelola kelestarian Adat Sando Batu dalam penelitian ini mencakup tiga aspek, yaitu perlindungan nilai dan simbol adat, pemberdayaan masyarakat adat, serta pengembangan tradisi dan inovasi. Ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa pelestarian adat tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan pelaksanaan ritual, tetapi juga mencakup upaya menjaga makna budaya, memperkuat kapasitas masyarakat, serta menyesuaikan cara pewarisan adat dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Perlindungan Nilai dan Simbol Adat

Perlindungan nilai dan simbol merupakan bagian penting dalam menjaga identitas Adat Sando Batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa, tokoh adat, dan masyarakat memiliki perhatian terhadap pentingnya menjaga nilai dan simbol yang terkandung dalam adat. Pemerintah desa memberikan dukungan melalui pembinaan, sosialisasi, dan koordinasi, sedangkan tokoh adat berperan dalam menjaga makna dan tata cara pelaksanaan adat. Masyarakat kemudian mempertahankan keberadaan nilai tersebut melalui keterlibatan dalam kegiatan adat dan penerapannya dalam kehidupan sosial.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan adat membutuhkan pembagian peran yang saling melengkapi. Pemerintah desa memiliki kapasitas kelembagaan untuk memberikan dukungan dan fasilitasi, sedangkan tokoh adat memiliki pengetahuan mengenai nilai dan makna budaya. Masyarakat menjadi pihak yang menjalankan dan mewariskan adat. Oleh karena itu, perlindungan nilai dan simbol Adat Sando Batu perlu dilakukan melalui kolaborasi antarpihak dan tidak hanya mengandalkan kebijakan pemerintah desa.

Pemberdayaan Masyarakat Adat

Pemberdayaan masyarakat merupakan unsur penting karena keberadaan Adat Sando Batu sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat sebagai pelaksana dan pewaris tradisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melakukan pemberdayaan melalui pembinaan, pelatihan, sosialisasi, dan pelibatan masyarakat dalam kegiatan adat. Bentuk keterlibatan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat ditempatkan sebagai bagian dari proses pelestarian, bukan hanya sebagai penerima kebijakan.

Namun, pemberdayaan masih menghadapi persoalan pada keberlanjutan pembinaan generasi muda. Pengetahuan mengenai adat yang selama ini dijaga oleh tokoh adat perlu ditransmisikan secara lebih sistematis kepada generasi penerus. Oleh karena itu, pemberdayaan perlu diarahkan pada kegiatan yang bersifat berkelanjutan, terutama melalui pendidikan budaya, pelatihan, dokumentasi pengetahuan lokal, dan pelibatan generasi muda dalam kegiatan adat. Strategi tersebut dapat memperkuat regenerasi tanpa menghilangkan peran tokoh adat sebagai pemegang pengetahuan dan otoritas budaya.

Pengembangan Tradisi dan Inovasi Adat

Pengembangan tradisi dan inovasi diperlukan agar pelestarian adat tetap relevan dengan perubahan sosial tanpa menghilangkan substansi budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial mulai dipandang sebagai salah satu bentuk inovasi yang dapat digunakan untuk memperkenalkan Adat Sando Batu kepada masyarakat yang lebih luas. Penggunaan media digital dapat membantu memperluas informasi, meningkatkan perhatian generasi muda, dan mendukung dokumentasi budaya.

Namun, inovasi dalam pelestarian adat perlu dibatasi pada aspek yang tidak mengubah nilai dan makna yang bersifat mendasar. Inovasi dapat dilakukan melalui cara dokumentasi, edukasi, dan penyebaran informasi, sementara nilai, simbol, serta praktik yang memiliki makna sakral tetap perlu dijaga berdasarkan ketentuan adat. Dalam konteks ini, pemerintah desa dapat berperan sebagai fasilitator digitalisasi budaya, sedangkan tokoh adat memiliki peran penting dalam menentukan informasi budaya yang tepat untuk disampaikan kepada publik.

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 10 Oktober 2026

Kendala dalam Tata Kelola Kelestarian Adat Sando Batu

Hasil penelitian mengidentifikasi empat kendala utama dalam tata kelola kelestarian Adat Sando Batu, yaitu belum adanya regulasi khusus, keterbatasan sarana dan prasarana, pembinaan generasi muda yang belum berkelanjutan, serta pemanfaatan media digital yang belum optima**l**. Kendala tersebut menunjukkan bahwa pelestarian adat telah memperoleh dukungan pemerintah desa dan masyarakat, tetapi belum sepenuhnya didukung oleh perangkat kelembagaan, sumber daya, dan strategi pelestarian yang berkelanjutan.

Belum adanya Perdes menjadi kendala pada aspek kelembagaan karena pelestarian adat belum memiliki dasar hukum desa yang secara khusus mengatur perlindungan dan pengembangannya. Pada aspek fasilitas, perbaikan akses jalan telah menunjukkan adanya dukungan pemerintah dan masyarakat, tetapi kebutuhan sarana pendukung lainnya belum sepenuhnya terpenuhi. Sementara itu, pembinaan generasi muda yang belum rutin berpotensi menghambat proses pewarisan pengetahuan dan nilai adat. Pemanfaatan media digital juga masih perlu dikembangkan agar dapat berfungsi tidak hanya sebagai media promosi, tetapi sebagai sarana dokumentasi dan edukasi budaya.

Dengan demikian, kendala yang ditemukan tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dengan kapasitas tata kelola pelestarian adat. Penguatan regulasi perlu berjalan bersama dengan peningkatan fasilitas, pembinaan generasi muda, dan pengembangan digitalisasi budaya. Keempat aspek tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah desa dalam membangun tata kelola pelestarian yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tana Toro telah menjalankan peran sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam tata kelola kelestarian Adat Sando Batu, tetapi tingkat pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Peran dinamisator relatif terlihat melalui pelibatan masyarakat, tokoh adat, dan kegiatan pembinaan, sedangkan peran fasilitator terlihat melalui dukungan terhadap aksesibilitas, sarana pendukung, dan pemanfaatan media digital. Adapun peran regulator masih menghadapi kelemahan karena belum terdapat Perdes yang secara khusus memberikan dasar kelembagaan bagi pelestarian Adat Sando Batu.

Temuan tersebut menegaskan bahwa kelestarian Adat Sando Batu membutuhkan tata kelola yang mengintegrasikan perlindungan nilai dan simbol, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan tradisi dan inovasi. Pemerintah desa tidak dapat bekerja sendiri karena keberlanjutan adat bergantung pada hubungan antara pemerintah desa sebagai pengarah dan fasilitator, tokoh adat sebagai penjaga pengetahuan dan nilai budaya, serta masyarakat dan generasi muda sebagai pelaksana sekaligus penerus tradisi. Oleh karena itu, penguatan tata kelola ke depan perlu diarahkan pada penyusunan regulasi desa secara partisipatif, peningkatan pembinaan generasi muda, pemenuhan sarana dan prasarana, serta pemanfaatan media digital yang tetap berlandaskan pada nilai dan ketentuan Adat Sando Batu.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Pemerintah Desa Tana Toro dalam tata kelola kelestarian Adat Sando Batu telah dilaksanakan melalui fungsi regulator, dinamisator, dan fasilitator, tetapi belum berjalan secara optimal. Peran dinamisator diwujudkan melalui pembinaan dan pelibatan masyarakat serta tokoh adat dalam kegiatan pelestarian, sedangkan peran fasilitator dilakukan melalui dukungan terhadap aksesibilitas lokasi adat, kebutuhan sarana pendukung, dan pemanfaatan media digital untuk memperkenalkan Adat Sando Batu. Adapun peran sebagai regulator masih terbatas karena belum terdapat Peraturan Desa yang secara khusus mengatur pelestarian Adat Sando Batu.

Tata kelola kelestarian Adat Sando Batu berlangsung melalui perlindungan nilai dan simbol adat, pemberdayaan masyarakat adat, serta pengembangan tradisi dan inovasi. Pelaksanaannya didukung oleh keterlibatan pemerintah desa, tokoh adat, dan masyarakat, tetapi masih menghadapi empat kendala utama, yaitu belum adanya regulasi khusus, keterbatasan sarana dan prasarana, belum berkelanjutannya pembinaan generasi muda, dan belum optimalnya pemanfaatan media digital. Temuan ini menegaskan bahwa keberlanjutan Adat Sando Batu tidak cukup dipertahankan melalui pelaksanaan ritual, tetapi

memerlukan tata kelola yang mampu menghubungkan perlindungan nilai adat dengan penguatan kelembagaan, partisipasi masyarakat, regenerasi pengetahuan, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Oleh karena itu, penguatan tata kelola kelestarian Adat Sando Batu perlu diprioritaskan pada penyusunan regulasi desa secara partisipatif, penguatan pembinaan dan regenerasi pengetahuan adat, pemenuhan sarana dan prasarana pendukung, serta pengembangan dokumentasi dan promosi budaya melalui media digital. Seluruh upaya tersebut perlu dilaksanakan secara kolaboratif dengan tetap menempatkan nilai, simbol, dan ketentuan adat sebagai dasar utama agar proses adaptasi terhadap perubahan zaman tidak menghilangkan identitas dan makna Adat Sando Batu.

REFERENSI

Adhi, Y. P., Sulistianingsih, D., and Fidiyani, R. 2021. Pengelolaan Kekayaan Intelektual Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Penguatan Budaya Literasi, Kreativitas, Dan Inovasi. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia* 4(1): 18–30. DOI: 10.15294/jphi.v4i1.49934

Ansell, C., and Gash, A. 2008. Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory* 18(4): 543–571. DOI: 10.1093/jopart/mum032

Cresell, J. W. 2007. *Qualitative inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publications, Thousand Oaks, CA.

Creswell, J. W., and Poth, C. N. 2018. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publications.

Hariri, A. 2019. Eksistensi Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Perspektif Asas Subsidiaritas Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 26(2): 253. DOI: 10.22219/jihl.v26i2.7799

Merriam, S. B., and Tisdell, E. J. 2016. *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*. Jossey-Bass.

Merriam, S. B., and Tissdell, E. J. 2015. *Qualitative: A Guide to Design and Implementation*. *A Wiley Brand* Jossey-Bass, San Francisco, CA.

Miles, M. B., Huberman, A. M., and Saldaña, J. 2020. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.

Pratiwi, A. E., Triyono, S., Rezkiyanto, I., Asad, A. S., and Khollimah, D. A. 2018. Eksistensi masyarakat adat dit engah globalisasi. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 15(2): 95–102. DOI: 10.21831/jc.v15i2.17289

Todapa, D. T., and Juemi. 2022. Penguatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan masyarakat dalam pelestarian adat budaya Desa Kamarora B. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia*.

Widianto, A. A., and Lutfiana, R. F. 2021. Kearifan Lokal Kabumi: Media Internalisasi Nilai-Nilai Karakter Masyarakat Tuban Jawa Timur. *Satwika : Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial* 5(1): 118–130. DOI: 10.22219/satwika.v5i1.15929

Widiyanto, D. 2021. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Kesenian Tradisional Di Kabupaten Jember. *PUSKAPSI Law Review* 1(2): 170. DOI: 10.19184/puskapsi.v1i2.28888

Windah, W., Nonci, N., and Hakim, A. 2025. Peran Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Potensi Wisata Lokal Di Desa Tana Toro Kecematan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan* 12(2): 39–50. DOI: 10.56015/gjikplp.v12i2.537

Yadi, F., and Prihatin, P. S. 2024. Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola kearifan Lokal Lubuk Larangan Di Desa Teluk Paman Timur Kecamtan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan* 1(4): 552–558. DOI: 10.25299/jmp..19235

Zulfa, L., & Hidayati, R. (2018). Analisis Pengaruh Persepsi Risiko, Kualitas Situs Web, Dan Kepercayaan Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen E-Commerce Shopee Di Kota Semarang. *Diponegoro Journal of Management*, *7*(3), 1–11. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dbr